

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1. PERENCANAAN**

Urusan Perencanaan dilakukan oleh perangkat daerah Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 15 kecamatan dan 29 kelurahan se Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar Rp11.627.834.599,00 atau 0,56% dari total alokasi APBD tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00. Alokasi sebesar Rp11.627.834.599,00 dapat terealisasi sebesar Rp10.617.540.318,00 atau 91,31%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.E.1.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Perencanaan Tahun 2018

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi Anggaran	
			(Rupiah)	%
A	Belanja Langsung	7.901.733.000	7.369.612.868	93,27
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	0	0,00
2	Program Pengembangan Data/Informasi	90.000.000	79.715.000	88,57
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.990.950.000	1.828.050.996	91,82
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.300.000.000	2.101.942.000	91,39
5	Program Perencanaan Sosial Budaya	1.561.000.000	1.501.922.724	96,21
6	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	360.000.000	352.995.100	98,05
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	100.000.000	92.434.000	92,43
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	912.283.000	850.044.789	93,18
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	572.500.000	562.508.259	98,25
B	Belanja Tidak langsung	3.726.101.599	3.247.927.450	87,17
1.	Belanja Pegawai	3.726.101.599	3.247.927.450	87,17
	Jumlah total	11.627.834.599	10.617.540.318	91,31

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bertujuan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis aparat Bappeda Kabupaten Wonosobo melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2) Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka memvisualisasikan kondisi Kabupaten Wonosobo serta mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD), berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Wonosobo yang dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah pada kurun waktu tertentu.

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan terlaksananya musrenbang dan penyusunan RKPD 2019, penyusunan KUA dan PPAS perubahan 2018 dan penetapan 2019, terlaksananya penyusunan LKPJ LPPD EKPPD serta terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk :

- Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah maupun sektor.
- Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya .
- Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya dalam prioritas pembangunan.
- Memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian, industri, koperasi UMKM serta pariwisata yang antara lain berupa kegiatan fasilitasi untuk pengembangan fedep, klaster dan agropolitan serta penyusunan kajian tentang produk unggulan daerah maupun pengembangan kawasan ekonomi terpadu, juga pengembangan city branding. Di mana tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain memberikan informasi dan arahan bagi pelaksana pembangunan di bidang ekonomi dan pelaku ekonomi tentang potensi klaster, kajian pasar tani agropolitan, roadmap produk unggulan daerah dan kajian arah pengembangan kawasan ekonomi terpadu, sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Di samping itu juga ditetapkan city branding Wonosobo **"The Soul of Java"** sebagai branding Wonosobo.

5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk tercapainya perencanaan pembangunan sosial dan budaya melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain perencanaan pendidikan untuk semua, fasilitasi Kabupaten ramah HAM, SDG's, KHPPIA, GAKY serta program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas program SDG's dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dimaksudkan agar tercipta perencanaan yang terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah dan ecodistrik.

7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk terciptanya sistim penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien melalui kegiatan penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana.

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor maupun Sarana Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor maupun Perlengkapan Kantor serta Fasilitasi Tenaga Kebersihan.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.E.1.2

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	96,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00
2	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD	%	84,70	100,00	90,00	90,00	◇	100,00
3	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00
4	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2,93	>3 (sangat tinggi)	3,06	102,00	0	>3 (sangat tinggi)
5	Persentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00
6	Persentase serapan kegiatan dan anggaran	%	85,74	100,00	90,89	90,89	◇	100,00
7	Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan	%	100,00	40,00	27,59	68,97	● ● ●	60,00
8	Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah	%	70,00	100,00	43,00	43,00	● ● ●	100,00
9	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	90,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00

IV.E.1. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
10	Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	%	80,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00
11	Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	%	3,00	6,00	2,70	45,00	...	30,00
12	Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	%	14,29	6,00	20,00	333,33	0	30,00
13	Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP		50	2	1	50,00	...	8
14	Persentase dokumen perencanaan wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasi dalam DED	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00
15	Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan	%	1,00	9,00	5,08	56,44	...	18,00
16	Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/ Luas wilayah)		1,01	79,60	101,4	127,45	0	80,00
17	Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam	%	8,54	80,00	85,00	106,25	0	90,00
18	Persentase Panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang	%	48,24%	60,00	52,80	88,00	◇	60,00
19	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	%	40,00	56,50	42,00	74,34	...	100,00

IV.E.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
20	Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system)	%	10,00	11,00	8,00	72,73	●●●	20,00
21	Persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	%	35,00	45,00	35,00	77,78	●●●	75,00
22	Rapor ketangguhan bencana		Sedang	baik	Baik	Baik	0	Baik
23	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	%	50,00	60,00	42,00	70,00	●●●	100,00

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $> 80\% - 99,99\%$
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $> 40\%$ dan $< 80\%$
△△△△	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan bisa dilihat dari indikator RKPD 2018. Di mana dari 23 indikator, 11 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian antara lain persentase aparat perencanaan yang memiliki sertifikat diklat perencanaan, di mana pada tahun 2018 baru mencapai 27,59% atau baru ada 9 orang dari 29 orang. Hal ini menunjukkan rendahnya motivasi pegawai dalam mengikuti diklat, meskipun diklat tersebut sangat penting untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pegawai di Bappeda. Kedepannya perlu adanya kesempatan bagi pegawai Bappeda untuk mengikuti diklat perencanaan sehingga akan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam menunjang kualitas pekerjaan.

Indikator yang lain adalah persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP, dimana di tahun 2018 sebesar 2,7 % dan nilai ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2017. Perlambatan ini terjadi karena adanya kelangkaan buah khususnya carica yang dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi yang cukup tajam. Demikian pula untuk indikator pengembangan kawasan perdesaan berbasis OVOP untuk tahun ini hanya terbentuk satu kawasan yaitu kawasan Kosalamo (Kumejing,

IV.E.1.FungsiPenunjangUrusanPemerintahanPerencanaan

Sanggrahan/Plunjaran, Lancar, Somogede) dengan produknya berupa pariwisata berbasis desa wisata. Sedangkan jumlah desa yang menjadi pusat pertumbuhan baru 5,08% yaitu desa Binangun, Randusari dan Lancar. Terkait hal tersebut perlu kerja sama OPD untuk lebih mensinergikan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan jangkauan/perluasan produk baik melalui permodalan, pemasaran maupun penggunaan teknologi.

Indikator lainnya yang perlu perhatian adalah terkait dengan kebencanaan, di mana jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontijensi baru 35% dan apabila dibandingkan dengan seluruh bencana yang ada, rencana kontijensi yang tersusun baru 42% yaitu rencana kontijensi tanah longsor di Kecamatan Kaliwiro, Kejajar dan Watumalang serta review rencana kontijensi gunung Sindoro. Sedangkan kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana baru 42% antara lain Kecamatan Kaliwiro, Watumalang dan Sukoharjo. Sementara desa rawan bencana yang terpasang EWS baru 8,00% yaitu desa Pulus, Gelangan, Garunglor, Tieng, Pagerejo, Ngasinan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Perencanaan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu:

Tabel IV.E.1.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Perencanaan

No	Masalah	Solusi
1.	Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang.	▪ Membuat perencanaan atas pelaksanaan koordinasi meliputi waktu, agenda dan siapa yang terlibat. ▪ Menyamakan persepsi tentang tujuan yang akan dicapai. ▪ Masing-masing pihak memahami posisi dan tanggung jawabnya.
2.	Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.	Pemenuhan SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan daerah.
3.	Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.	Memberikan sosialisasi kepada PD tentang skala prioritas program dan kegiatan yang outcome dan outputnya bisa menyumbang capaian kinerja sasaran PD dan visi Bupati.